

**KOORDINASI ANTAR *STAKEHOLDERS* DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN GADING
REJO KABUPATEN PRINGSEWU SEBAGAI UPAYA Mendukung
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***

(Skripsi)

Oleh

Suryo Agung Nugroho



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019**

**COORDINATION AMONG STAKEHOLDERS IN THE IMPLEMENTATION
OF PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) IN GADING REJO
SUBDISTRICT, PRINGSEWU REGENCY TO SUPPORT SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS**

By
Suryo Agung Nugroho

Indonesia is one of the developing countries in the world that has many social problems one of which is poverty. The Government issued a special program called the Program Keluarga Harapan (PKH) based on the Republic of Indonesia Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Program Keluarga Harapan. To overcome this PKH problem, good coordination among stakeholders in the implementation of this program is needed hence this PKH can be a policy development strategy in the field of social protection while accelerating poverty reduction to accelerate the achievement of SDGs goals. The purpose of this study is to find out the analysis of Coordination Between Stakeholders in the Implementation of PKH in Gading Rejo Subdistrict, Pringsewu Regency as an Effort to Support Sustainable Development Goals. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The results of this study indicates that coordination among these stakeholders has proceeded but has not yet been optimal. There is no social work supervisor, lack of attention in every meeting or discussion held by this institution and lack of infrastructures to support the activity to deliver the service..

Keywords: Coordination, Stakeholders, Program Keluarga Harapan (PKH), Sustainable Development Goals (SDGs)

ABSTRAK

KOORDINASI ANTAR *STAKEHOLDERS* DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN GADING REJO KABUPATEN PRINGSEWU SEBAGAI UPAYA Mendukung *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Oleh

Suryo Agung Nugroho

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang masih memiliki banyak masalah sosial dalam upaya untuk berkembang, salah satunya kemiskinan. Timbulnya permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, Pemerintah mengeluarkan program khusus yang dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Untuk menanggulangi permasalahan PKH tersebut diperlukannya koordinasi yang baik antar *stakeholders* dalam pelaksanaan program ini sehingga PKH ini dapat menjadi strategi pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial sekaligus percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat pencapaian tujuan SDGs. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis Koordinasi Antar *Stakeholders* Dalam Pelaksanaan PKH di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Sebagai Upaya Mendukung *Sustainable Development Goals*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan antar *stakeholders* tersebut sudah berjalan namun belum maksimal karena di Kabupaten Pringsewu tidak terdapat supervisor pekerjaan sosial sehingga tugas dan fungsi nya tersebut dialihkan kepada koordinator Kabupaten Pringsewu, lalu kurangnya pemahaman yang dimiliki KPM PKH serta *stakeholders* lainnya serta rasa kepentingan untuk hadir dalam setiap pertemuan rapat koordinasi dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yaitu sekretariat masih menyewa tempat yang

kata kunci : koordinasi, stakeholders, program keluarga harapan (PKH) ,
sustainable Development Goals

**KOORDINASI ANTAR *STAKEHOLDERS* DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN GADING
REJO KABUPATEN PRINGSEWU SEBAGAI UPAYA Mendukung
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***

Oleh

SURYO AGUNG NUGROHO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Pada

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **KOORDINASI ANTAR *STAKEHOLDERS* DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN GADING REJO KABUPATEN PRINGSEWU SEBAGAI UPAYA Mendukung *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***

Nama Mahasiswa : **Suryo Agung Nugroho**


No. Pokok Mahasiswa : 1516041055

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002



Devi Yulianti, S.AN., M.A.
NIP 19850705 200812 2 004


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. 

Sekretaris : Devi Yulianti, S.AN., M.A. 

Penguji Utama : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 195908031986031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Oktober 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandarlampung, 10 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Suryo Agung Nugroho

NPM. 1516041055

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Suryo Agung Nugroho, lahir di Waringinsari, pada tanggal 4 April 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sudiman dan Ibu Sunaryati. Memulai jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Waringinsari Barat pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2012 menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pringsewu. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada tahun 2018 di bulan Februari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Napal Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus selama 40 hari.

Selama menimba ilmu di Universitas Lampung, penulis juga turut aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan. Keikutsertaan penulis dalam organisasi kampus dimulai sejak penulis bergabung dengan Divisi KPK (Kajian Pengembangan Keilmuan) dan terakhir bergabung dengan Divisi DAIN (Data dan Informasi) Himagara (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara) FISIP Universitas Lampung.

Selanjutnya penulis aktif di organisasi fakultas yaitu FSPI (Forum Studi Pengembangan Islam) sebagai Kepala Bidang divisi BPH (Badan Pengurus Harian). Tidak hanya organisasi di Fakultas namun penulis juga sempat aktif dalam organisasi Universitas yaitu BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) pada divisi KESMA (Kesejahteraan Mahasiswa).

MOTTO

“Success seems to be connected with action. Successful men keep moving. They make mistakes, but they don’t quit.”

(Conrad Hilton)

“There is no substitute for hard work”

(Thomas Alva Edison)

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”

(Tan Malaka)

“Belajarlah menikmati sebuah proses, sebab kupu-kupu yang indah punya proses panjang untuk bisa terbang”

(Suryo Agung Nugroho)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT

Maha syukur ku kepada Allah SWT, atas segala hikmat dan kekuatan jiwa yang tak pernah lelah berjalan bersama langkah-langkah kecil ku sepanjang hidup ini

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang menyayangiku:

Bapak, Ibu dan Kakak Tercinta

Yang selalu memberikan kekuatan untuk menjalani semua proses ini dan yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan kasih sayangnya yang tiada henti.

*Segenap keluarga besar yang selalu mencurahkan
Dukungan dan doanya kepadaku*

*Sahabat-sahabat yang selalu ada dan setiap
Menemaniku saat suka maupun duka
Para Dosen dan Civitas Akademika*

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, dan doa agar bisa sukses
kedepannya.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah yang diberikan oleh Allah S.W.T serta berkat doa dan restu dari orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**KOORDINASI ANTAR *STAKEHOLDERS* DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN GADING REJO KABUPATEN PRINGSEWU SEBAGAI UPAYA Mendukung *Sustainable Development Goals*”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca sehingga penulis dapat berkembang di masa yang akan datang. Penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah S.W.T Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Nabi Muhammad S.A.W yang menjadi contoh teladan semua umatnya hingga akhir zaman kelak.
2. Kedua orangtuaku, Bapak dan Ibu tercinta Bapak Sudiman dan Ibu Sunaryati serta tak lupa kakakku Ari Rohmawati dan Salamah yang merupakan inspirasi terbesar penulis. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya, tidak akan terbayangkan betapa bangganya aku mempunyai dua orang tua dan kakak hebat seperti kalian.
3. Bapak Dr.Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberri semangat, dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Devi Yulianti, S.A.N.,M.A selaku pembimbing kedua dan selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan semangat kepada penulis untuk tidak putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, motivasii saran, serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos,. M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini.
6. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

7. Ibu Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP UNILA. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga bagi penulis kedepannya.
9. Seluruh Staff Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP UNILA yang telah memberikan pelayanan dan kelancaran administrasi sehingga penulis dapat terbantu dalam menyelesaikan skripsi sekaligus Bapak/Ibu Karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
10. Teruntuk Desy Hilma, aku senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang telah menghadirkan kamu dalam hidup. Terimakasih telah menjadi seseorang yang telah menemani dalam panjang nya proses perjuangan skripsi ini. Terimakasih atas kebaikan dan kesabarannya
11. Para saudaraku di Pringsewu, Ipan *Owner* Summer Ice, Em Rizki *Owner* Pizza Brotherhood, Yafi *Owner* ternak burung love bird, Gilang *Owner* Tobstore. Semoga makin jaya dan sukses usaha-usahanya. Panjang umur persaudaraan.
12. Teman-teman kosan Wisma Timur yaitu Wimpi BRIPTU, Bude Jimly, Kiyai Fano, Bahtiar, Dimas, Farhan, Candra, Adi Pol, Dian Winantu, Juned, dan Nandar. Terimakasih dengan segala keanehan sifat-sifat kalian. Semoga Tuhan mengampuni kalian.

13. Teman-teman kosan kimochi yaitu Budi, Supri, Oscar, Yoga, ASG, semoga kalian menjadi lelaki sebagaimana mestinya.
14. Sahabat perjuangan GOD PEOPLE yaitu Rifky Opung *like a boss*, Le Ogi the big boy, Ari bujang sang pekerja keras, Aziz bapak pencari nafkah, Dedi sang punya hati yang lembut, Bobby the rocker, Nafi kiyai, Lia dan Farida. Terimakasih, haturnuhun, thankyou, matursuwon segala kebaikan dan keceriaan. Jadi sahabat dan keluarga yang sebenarnya dan bukan mengada-ngada.
15. Teruntuk orang-orang super HIMA ACT 2015, Jeki Koorlap, Rizki Ketua angkatan, Cindy Bendum, Basri Sekplak, Hanif, Ana, Meika, Tala, Elva, Tina, Dinan, Atan, Iyan, Bayu, Dwiyan, Ijal Golok, Yuan, Kadek, Rohani, Reza, Tiwi, Dita dan semua angkatan 15 serta Bang Adi, Bang Fery, Bang Sidik, Bang Leo, Bang Binter, Bang Idin. Dari *first event* itu saya percaya ada orang-orang yang hebat seperti kalian.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandarlampung, 10 Oktober 2019

Penulis,

Suryo Agung Nugroho

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Penelitian Terdahulu	11
2. Manajemen.....	12
a. Pengertian Manajemen.....	12
b. Fungsi Manajemen	14
c. Klasifikasi Manajemen.....	17
3. Koordinasi	18
a. Pengertian Koordinasi	18
b. Tipe Koordinasi.....	19
c. Tujuan dan Pentingnya Koordinasi	21
d. Syarat-syarat Koordinasi.....	22
e. Cara-cara Mengadakan Koordinasi.....	22
f. Karakteristik Koordinasi yang Efektif	23
g. Sifat-Sifat Koordinasi.....	23
h. Mengukur Koordinasi	24
i. Hubungan Koordinasi dengan Fungsi-Fungsi Manajemen.....	25
4. <i>Stakeholders</i>	26
a. Pengertian <i>Stakeholders</i>	26
b. Kategori <i>Stakeholders</i>	28
5. Program Keluarga Harapan.....	29

a. Pengertian PKH.....	29
b. Tujuan PKH	29
c. Sasaran PKH	30
d. Hak dan Kewajiban KPM PKH	30
e. Mekanisme Pelaksanaan PKH	31
6. <i>Sustainable Development Goals</i>	33
7. Kerangka Pikir	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	46
F. Teknik Keabsahan Data	48

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu.....	52
1.1. Sejarah Kabupaten Pringsewu	52
1.2. Visi dan Misi Kabupaten Pringsewu.....	53
1.3. Geografis Kabupaten Pringsewu.....	54
1.4. Administrasi Pemerintahan	54
1.5. Kependudukan.....	56
2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.....	59
2.1. Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu	59
2.2. Tugas dan Fungsi	60
2.3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.....	61
B. Hasil Penelitian	62
1. Komunikasi	68
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi	76
3. Kompetensi Partisipan	78
4. Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi	81
5. Kontinuitas Perencanaan	83
C. Pembahasan.....	85
1. Komunikasi	89
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi	92
3. Kompetensi Partisipan	95
4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi	97
5. Kontinuitas Perencanaan.....	101

V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. BDT Kemiskinan Kabupaten Pringsewu Tahun 2018.....	4
2. Penelitian Terdahulu	11
3. Daftar informan.....	44
4. Objek observasi.....	45
5. Dokumentasi penelitian.....	46
6. Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.....	56
7. Banyaknya Kelurahan, Pekon, Dusun dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu tahun 2017	56
8. Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2016	57
9. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2016.....	58
10. Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Pringsewu Tahun 2016.....	59
11. Presantase Penduduk Miskin Kabupaten Pringsewu 2015-2018.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Simbol 17 tujuan SDGs.....	32
2. Kerangka pikir.....	39
3. Sistem koordinasi antar <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan PKH	63
4. Identifikasi <i>Stakeholders</i> dalam Pelaksanaan PKH di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.....	67
5. Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Pringsewu	70
6. Kantor Sekrtariat PKH Kabupaten Pringsewu	72
7. Grup <i>Whatsapp</i> Pendamping PKH Kecamatan Gading Rejo	74
8. Pertemuan Peningkatan Kecakapan Keluarga Pekon Wonodadi.....	75
9. Nota Kespakatan Kepolisian Republik Indonesia dengan Kementrian Sosial terkait Pengawasan Bantuan Sosial.....	79

DAFTAR SINGKATAN

PKH	Program Keluarga Harapan
BPS	Badan Pusat Statistik
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
<i>CCT</i>	<i>Conditional Cash Transfer</i>
BDT	Basis Data Terpadu
PBDT ART	Pemutakhiran Basis Data Terpadu Anggota Rumah Tangga
PBI	Penerima Bantuan Iuran
KIS	Kartu Indonesia Sehat
KIP	Kartu Indonesia Pintar
<i>SDGs</i>	<i>Sustainable Development Goals</i>
UPPKH	Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan
SIM PKH	Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Harapan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara-negara di belahan dunia tentunya memiliki suatu permasalahannya masing-masing terutama negara-negara berkembang. Bank Dunia mengelompokkan negara berkembang sebagai negara yang berpendapatan rendah dan menengah.¹ Masalah negara berkembang menyangkut mengenai rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang dan indeks perkembangan manusia yang kurang memadai.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, hal ini disebabkan karena kondisi yang masih memiliki beberapa aspek yang masih berstatus berkembang, salah satunya masyarakat. Masyarakat masih memiliki banyak masalah sosial dalam upaya untuk berkembang, salah satunya kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi saat seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk,

¹ STT Mandala Bandung, “Negara Berkembang, JurnalUmum”, http://indonesia.stt-mandala.web.id/ind/2517-2408/Negara-Berkembang_14552_stt-mandala_indonesia-stt-mandala.html (diakses pada 27 Agustus 2018, pukul 1.12).

pendidikan, kesehatan dan gizi². Menurut data kemiskinan dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 menunjukkan presentase penduduk miskin pada bulan September jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per-kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen. (www.bps.go.id diakses pada 18 agustus 2018).

Timbulnya permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, Pemerintah menjalankan fungsinya untuk melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan berupa program-program pembangunan seperti masalah yang sedang dihadapi ialah masalah sosial ekonomi yaitu masalah kemiskinan. Pemerintah perlu mengembangkan strategi dalam mengatasi masalah kemiskinan yaitu sebagai upaya rangka penanggulangan kemiskinan yang berbasis rumah tangga, pemerintah mengeluarkan program khusus yang dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)* yang terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi

² Yudid B.S.Tlonaen, Willy T.H, Carmia Diahloka. “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.3, No.1 (2014) hlm 29.

kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin³. Berdasarkan Data hasil validasi KPM PKH 2018 diketahui bahwa data awal Basis Data Terpadu (BDT) pusat data dan informasi yang dihimpun dari 514 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi sebanyak 7.043.746 keluarga. Kabupaten yang terhimpun ialah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pringsewu menjadi salah satu Kabupaten yang menanggulangi kemiskinan dengan melalui Program Keluarga Harapan. Kabupaten Pringsewu sendiri PKH telah memasuki tahun ke enam yang dimulai sejak akhir tahun 2012. Kabupaten Pringsewu jumlah PKH setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berawal berjumlah 4.797 KPM, sampai awal tahun 2018 ini telah mencapai 16.866 KPM. Peningkatan tersebut bukan dikarenakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pringsewu bertambah, tetapi

³ Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program Keluarga Harapan. <https://pkh.kemsos.go.id/tentang-pkh/apa-itu-pkh> (diakses pada 27 Agustus 2018, pukul 2.02).

dikarenakan perluasan jumlah keluarga penerima manfaat⁴. Berikut ini adalah tabel 1 tentang Basis Data Terpadu kemiskinan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018.

Tabel 1.
Basis Data Terpadu Kemiskinan Kabupaten Pringsewu Tahun 2018

Kab/Kota	Kecamatan	Jumlah Desa	Total Kel PBDT	PBDT ART	PKH (Keluarga)	RASTRA (Keluarga)	PBI/KIS APBN (Jiwa)
Pringsewu	Sukoharjo	16	5,262	18,263	1,894	2419	12820
	Pringsewu	15	6,391	23,781	2,395	2741	17135
	Pardasuka	13	4,984	18,471	2,671	3364	21257
	Pagelaran utara	10	2,351	8,558	1,355	1638	7021
	Pagelaran	23	5,025	18,018	2,162	2526	13751
	Gading Rejo	22	7,489	26,430	3,027	3738	20784
	Banyumas	11	1,922	6,862	891	1046	5161
	Ambarawa	8	3,254	11,462	1,306	1621	9709
	Adiluwih	13	3,074	10,553	1,165	1269	8676
	Z Total	131	39,752	142,398	16,866	20,362	116,314

(Sumber: Pra Riset, Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu 2018)

Menurut Tabel 1 terdapat data-data yang memperlihatkan bahwa data mengenai Basis Data Terpadu Kemiskinan yang tersebar di setiap kecamatan Kabupaten Pringsewu. Data-data diantaranya ialah jumlah desa setiap kecamatan, total keluarga Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), total anggota rumah tangga, total yang menerima PKH, total keluarga yang menerima RASTRA dan jumlah jiwa penerima PBI/KIS. Kabupaten Pringsewu memiliki 9 Kecamatan yaitu Sukoharjo, Pringsewu, Pardasuka, Pagelaran Utara, Pagelaran, Gading Rejo, Banyumas, Ambarawa dan Adiluwih. Jumlah desa yang terdapat di Kabupaten Pringsewu berjumlah 131 yang tersebar di setiap kecamatan dengan total PBDT keluarga sejumlah 39.752 dan 142.398 jumlah PBDT Anggota Rumah Tangga (ART). Kecamatan yang menarik

⁴ Radar Tanggamus. 2018. *Pringsewu Matangkan Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. <http://www.radartanggamus.co.id/2018/05/02/pringsewu-matangkan-program-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat/> diakses 12 Desember 2018 Pukul 17.55 WIB

perhatian ialah Kecamatan Gading Rejo dikarenakan memiliki jumlah PBDT Keluarga dan PBDT ART paling banyak diantara Kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu yaitu berjumlah 7.489 PBDT Keluarga dan 26.430 PBDT Anggota Rumah Tangga (ART) sehingga keluarga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gading Rejo terbilang sangat banyak yaitu berjumlah 3.027 keluarga. Angka ini cukup mengkhawatirkan karena begitu banyak keluarga di Kecamatan Gading Rejo yang masih terjerat kemiskinan karena didukung dengan banyaknya PBDT Keluarga dan PBDT ART. Bantuan yang diberikan melalui PKH seperti bantuan Non Tunai, bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP)⁵.

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibuat oleh pemerintah tentunya dalam pelaksanaannya memiliki suatu masalah atau kendala yang terjadi baik itu menyangkut dari segi pengelolaan, pencapaian, koordinasi maupun hasil. Masalah ini terdapat dalam ruang lingkup nasional, daerah Provinsi Lampung serta di lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Pringsewu. Masalah-masalah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini bersumber dari laporan-laporan maupun dari media massa. Masalah-masalah tersebut diantaranya yaitu seperti masalah pendataan, banyak data penduduk yang belum akurat dan tidak valid. Terdapat data yang tidak sesuai kriteria, ada yang sudah mampu namun masih menerima PKH, ada juga yang

⁵ Pra Riset, Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu. Pada Tanggal 1 September-7 September 2018.

tergolong miskin namun tidak mendapatkan PKH⁶. Masalah yang selanjutnya ialah banyaknya penggelapan dana bansos PKH sehingga memberatkan masyarakat KPM⁷ serta banyaknya masyarakat KPM PKH yang mengalami kendala saat pencairan dana di Bank karena masalah administrasi hal ini diakibatkan aliran informasi yang tidak berjalan dengan baik⁸. Untuk menanggulangi permasalahan PKH tersebut diperlukannya koordinasi yang baik antar *stakeholders* dalam pelaksanaan program ini sehingga PKH ini dapat menjadi strategi pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial sekaligus percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat pencapaian tujuan *SDGs*. Negara-negara di dunia telah merumuskan program untuk menekan angka kemiskinan. *Sustainable Development Goals* merupakan *global goals*. Dalam *SDGs* dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas⁹. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan.

PKH dalam pelaksanaannya dilakukan oleh *stakeholders* atau pihak-pihak terkait yaitu terdiri dari pihak Pemerintah (Bupati dan wakil, sekretaris daerah, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas) dan pihak non Pemerintah (rumah sakit, sekolah), koordinator PKH

⁶ RMOL.CO. *Data Kemensos Bermasalah, Program Rakyat Miskin Rawan Dipermainkan*. <https://nusantara.rmol.co/read/2018/04/15/335414/Data-Kemensos-Bermasalah,-Program-Rakyat-Miskin-Rawan-Dipermainkan-> diakses 25 November 2018 pukul 23.33 WIB.

⁷ AntaraNews.com. *Mensos: Oknum Pendamping Penyelewengan PKH di Proses Hukum*. <https://www.antaraneews.com/berita/725825/mensos-oknum-pendamping-penyelewengan-pkh-diproses-hukum> diakses 25 November 2018 pukul 23.44 WIB.

⁸ Lampost.com. *Terkendala Administrasi Saat Pencairan PKH? Solusinya Hubungi Dinsos*. <http://www.lampost.co/berita-terkendala-administrasi-saat-pencairan-pkh-solusinya-hubungi-dinsos.html> diakses 25 November 2018 pukul 23.48 WIB.

⁹ Ishartono dan Santoso. *Sustainable DevelopmentGoals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan*. *SocialWork Jurnal*, Vol.6, No.2 hlm 164.

Kabupaten Pringsewu, Koordinator PKH Kecamatan, pendamping PKH serta KPM PKH. Pelaksanaan PKH diperlukannya suatu koordinasi antar *stakeholders* yang berada di Kabupaten Pringsewu supaya semua kegiatan dapat selaras dan anggota-anggotanya dapat bekerja sama dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai dengan efisien. Koordinasi merupakan proses penarikan semua bagian organisasi, sehingga pengambilan keputusan, tugas-tugas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang-orang dan unit-unit terarah pada pencapaian tujuan secara optimal. Maka dari itu pengkoordinasian merupakan aktivitas dari fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerjasama yang selaras dan tertib mengarah pada tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh¹⁰. Keberhasilan atau kegagalan program ini sangat ditentukan oleh pelaksana program, apabila pelaksana program sudah mampu melaksanakannya dengan baik, diharapkan sasaran dari program ini akan dapat terakomodir, karena sebuah program dapat dikatakan baik bukan hanya dilihat dari bentuk program yang dikeluarkan, tetapi apakah program itu sudah mampu menjawab sesuai kebutuhan yang diperlukan. Pelaksana program yang baik dan mampu mengakomodir sasaran yang ada dalam hal ini masyarakat untuk dapat menjawab kebutuhan dan mewujudkan hasil yang ingin dicapai¹¹. Maka dari itu diperlukannya koordinasi antar *stakeholders* tersebut agar dalam pelaksanaan

¹⁰ Syamsi Ibnu. *Pokok-Pokok Organisasi & Manajemen*. Jakarta. PT RINEKA CIPTA. Hlm 113

¹¹ Devi Yulianti. *Implementasi Program Kemitraan Dalam Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan*. Administratio. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. hlm 2

program PKH dapat mencapai efisiensi, efektifitas dan produktifitas¹² sehingga masyarakat miskin yang terdapat di Kabupaten Pringsewu dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan serta mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti koordinasi antar *stakeholders* Program Keluarga Harapan yang terdapat di Kabupaten Pringsewu seperti koordinasi antar Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota hingga sampai Unit Pelaksana PKH Kabupaten dan Unit Pelaksana PKH Kecamatan, pendamping serta KPM PKH. Pihak-pihak yang terkait lainnya berasal dari pihak Pemerintah (Bupati dan wakil, sekretaris daerah, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas) dan pihak non Pemerintah (RS Swasta, Sekolah Swasta) untuk menyukseskan kelancaran PKH secara efisiensi dan efektivitas. Guna mendukung pencarian informasi apakah PKH tersebut menjalankan koordinasi dengan baik atau belum, maka penelitian ini mengarah pada koordinasi pelaksanaan PKH dengan mengangkat judul “Koordinasi antar *Stakeholders* dalam Pelaksanaan PKH Di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Sebagai Upaya Mendukung *Suistanable Development Goals*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Koordinasi antar *Stakeholders* dalam

¹² Akmal. *Koordinasi Antar Instansi Terkait Pelaksanaan Pembangunan di Daerah*. Jurnal Demokrasi, Vo.V, No.1 Th.2006, hlm 1-2.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Sebagai Upaya Mendukung *Sustainable Development Goals*?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi antar *Stakeholders* dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Sebagai Upaya Mendukung *Sustainable Development Goals*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini harapannya dapat memperkaya kajian-kajian studi administrasi Negara khususnya dalam mata kuliah Azas-Azas Manajemen yaitu yang berkaitan dengan koordinasi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan membuka pola berpikir yang baik dalam studi ilmu administrasi negara khususnya pada Koordinasi antar *stakeholders*.

b. Bagi Kecamatan Gading Rejo, penelitian ini menjadi evaluasi program Keluarga Harapan (PKH) dalam koordinasi antar *stakeholders* sehingga hasil dari koordinasi antar *stakeholders* yang baik dapat membantu masyarakat Kecamatan Gading Rejo dalam memperbaiki tingkat kemiskinan.

- c. Bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu, diharapkan hasil dari penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi serta menjadi bahan pertimbangan dan dapat memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai Koordinasi Antar *Stakeholders* Program Keluarga Harapan serta dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kecamatan Gading Rejo dalam hal mengentaskan kemiskinan sehingga tercapai kesejahteraan sosial dan terlepas dari garis kemiskinan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang penulis cantumkan dibawah ini, penulis tidak menemukan penelitian dengan lokasi yang sama seperti judul penelitian penulis, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurfahira Syamsir (2014)	Implemetasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar	Hasil penelitian diketahui bahwa dari faktor isi dan konteks kebijakan terdiri dari kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, deajat perubahan yang ingin dicapai sedangkan faktor konteks kebijakan terdiri atas kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, serta kepatuhan dan daya tanggap. Setelah diadakan penelitian, maka kesimpulan penelitian ini sudah berjalan baik walau masih terdapat kekurangan dalam pengimplemetasian.
2	Herman Susanto (2016)	Evaluasi Program Keluarga Harapan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat

		(PKH) di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan	deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran Lama sudah berjalan baik, terlihat dari proses pertemuan awal, pendampingan pencairan bantuan, pemutkahiran data, dan verifikasi komitmen peserta. Hanya saja kekurangan dari PKH ini berdampak masih banyaknya RTSM yang mempunyai ketergantungan dari bantuan PKH.
3	Denny Kurniawan (2017)	Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tarma Barat Kabupaten Anambas	Hasil penelitian ini bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tarma Barat Kabupaten Anambas mengalami beberapa hambatan seperti pendataan yang kurang tepat serta kerjasama antar implementor yang belum optimal.

(sumber : data diolah oleh peneliti, 2019)

Penulis menggunakan beberapa penelitian diatas untuk memperkaya hasil penelitian, pada variabel penelitian ada perbedaan dengan variabel yang penulis gunakan. Perbedaan variabel yaitu seperti pada penulis menggunakan variabel indikator koordinasi menurut Handayaniingrat. Selain itu, dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengambil lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.

B. Tinjauan Tentang Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, manajemen adalah mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola serta memperlakukan seseorang. Dalam konteks etimologis ini terlihat bahwa manajemen berkaitan dengan suatu usaha untuk melakukan pengarahan dan

pengendalian atas orang-orang demi tujuan dan kepentingan tertentu¹³. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan¹⁴. Menurut Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu¹⁵.

Terry mengatakan bahwa “*management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use human being and othe resources*”¹⁶. Artinya manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

J.A.F Stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses dalam membuat perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memimping (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*) berbagai usaha dari anggota organisasi dan

¹³ Eko Budi S & Rahayu Sulistiowati. *Azas-Azas Manajemen*. CV.Anugrah Utama Raharja (AURA). Bandarlampung.2015.hlm 29

¹⁴ Handoko, T.Hani. *Manajemen edisi kedua cetakan kedua puluh satu*. BPFY-Yogyakarta:Yogyakarta.2011

¹⁵ Hasibuan, Melayu. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta:Bumi Aksara. 2014. Hlm 2

¹⁶ Ibid.,hlm 8

menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Eko Budi Sulistio dan Rahayu Sulistiowati mendefinisikan manajemen sebagai ilmu yang mempelajari segala aktifitas yang dilakukan para pemimpin organisasi dalam menggerakkan orang-orang dan menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Segala aktifitas yang dimaksud adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pemberian motivasi, pengendalian dan sebagainya yang membuat organisasi bergerak kearah pencapaian tujuan¹⁷.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu kesatuan antara ilmu dan seni yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan manajemen menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber yang lainnya secara efektif dan efisien.

2. Fungsi Manajemen

Fayol membagi manajemen menjadi lima fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi dan pengendalian¹⁸. Berikut adalah penjelasan fungsi manajemen tersebut:

¹⁷ Eko Budi S & Rahayu Sulistiowati. *Azas-Azas Manajemen*. CV.Anugrah Utama Raharja (AURA). Bandarlampung.2015.hlm 29-31

¹⁸ Manulang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press. 2012.hlm 7

a. *Planning* (Perencanaan)

Pembatasan yang kompleks merumuskan perencanaan sebagai penetapan yang harus dicapai, bila hal itu dicapai, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa penetapan harus dicapai. Perencanaan disusun dan ditetapkan *budgeting*. Oleh karena itu lebih tepatnya *planning* dirumuskan sebagai penetapan tujuan, *policy*, prosedur, *budget*, dan program dari suatu organisasi.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing merupakan pengelompokan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Pengorganisasian dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

c. *Commanding*

Commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju kepada realisasi tujuan yang telah ditetapkan.

d. *Coordinating* (Koordinasi)

Coordinating merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha tersebut antara lain memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan *coaching* serta teguran.

e. Controlling (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan sering disebut juga pengendalian yaitu mengadakan pemantauan dan koreksi sehingga bawahan dapat melakukan tugasnya dengan benar sesuai tujuan semula.

Menurut beberapa pendapat ahli tentang fungsi manajemen, salah satu fungsi manajemen yang akan dipaparkan dalam penelitian ini adalah koordinasi. Koordinasi dalam organisasi maupun antar organisasi itu sangat penting karena tanpa adanya koordinasi dalam suatu organisasi tidak akan tercapai suatu tujuan organisasi yang efektif dan efisien serta tidak adanya kerjasama yang baik.

Sementara itu fungsi manajemen menurut Luther Gullick adalah POSDCRB yaitu merupakan fungsi manajemen yang terdiri dari¹⁹ :

¹⁹ Eko Budi S & Rahayu Sulistiowati. *Azas-Azas Manajemen*. CV.Anugrah Utama Raharja (AURA). Bandarlampung.2015.hlm 96-99

- a. *Planning* (Perencanaan)
- b. *Organizing* (pengorganisasian)
- c. *Staffing* (Penyusunan Pegawai)
- d. *Directing* (Pengarahan)
- e. *Coordinating* (koordinasi)
- f. *Reporting* (Pelaporan)

3. Klasifikasi Manajemen

Manajemen dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatan dan fungsinya. Berdasarkan tingkatan secara umum ada 3 tingkatan manajemen yakni *top management*, *middle management* dan *lower management*. Yang dimaksud dengan *top management* adalah posisi manajemen yang berada pada kedudukan paling tinggi (puncak). Orang-orang yang menduduki jabatan dalam jajaran *top management* merupakan sekelompok kecil eksekutif yang bertanggung jawab terhadap seluruh agenda dan kegiatan organisasi. *Middle management* merupakan tingkatan manajemen yang posisinya ditengah, dapat dikatakan menjadi penghubung kebijakan antara manajer puncak dan manajer-manaje lini. Sedangkan *lower management* merupakan struktur manajemen yang posisinya paling rendah dan berlangsung berhadapan dengan karyawan. Manajer lini justru sangat vital karena menentukan apakah organisasi ini bergerak atau tidak²⁰.

²⁰ Eko Budi S & Rahayu Sulistiowati. *Azas-Azas Manajemen*. CV.Anugrah Utama Raharja (AURA). Bandarlampung.2015.hlm 46-47

A. Tinjauan Tentang Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Kata *coordination* berasal dari *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate* dari pendekatan empirik yang dikaitkan dari segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama menyepakati hal tertentu. Menurut Ndraha secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Secara fungsional koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja²¹.

Koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan²². Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu antara lain dengan memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberi penjelasan, bimbingan atau nasihat, mengadakan pelatihan dan bila perlu memberi teguran. Koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama antara badan, instansi unit dalam pelaksanaan

²¹ Ndraha, Taliziduhu. *Kybernologi I Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta. Rineka Cipta. 2011.hlm 290

²² Hasibuan, Malayu S.P.,Haji. *Manajemen: dasar, pengertian dan masalah*. Jakarta.Bumi Aksara, 2006. Hlm 85

tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi²³. Koordinasi dapat berasaskan bahwa di dalam organisasi harus ada keselarasan aktivitas antar satuan organisasi atau keselarasan.

Koordinasi adalah meningkat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan usaha. Untuk terciptanya suatu organisasi yang baik berupa :

1. Antara unit dan sub unit dengan unit lainnya dapat bekerja sama dengan serasi.
2. Masing-masing unit dan sub unit mengetahui bagian tugas yang mana yang harus bekerjasama dengan unit lainnya.
3. Unit atau sub unit harus dapat menyesuaikan diri dengan jadwal waktu kerjasama dengan unit/sub unit lainnya.

2. Tipe Koordinasi

Organisasi dalam mencapai tujuan sangat diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi yang baik agar tercapainya suatu pembagian kerja yang baik. Setiap organisasi memiliki tipe koordinasi yang berbeda dan ada beberapa tipe koordinasi yang digunakan dalam organisasi. Tipe-tipe koordinasi menurut Hasibuan²⁴ meliputi:

a. Koordinasi Vertical

Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.

²³ Ibid.,. Hlm 86

²⁴ Hasibuan, Malayu S.P.,Haji. *Manajemen: dasar, pengertian dan masalah*. Jakarta.Bumi Aksara, 2006. Hlm 86

b. Koordinasi horizontal

Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi setingkat. Koordinasi horizontal terbagi atas dua, yaitu:

1. *Interdisciplinary*, yaitu suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antar unit yang satu dengan unit yang lain secara *intern* maupun *ekstern* pada unit-unit yang sama tugasnya.
2. *Interrelated*, yakni koordinasi antar badan (instansi). Unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik secara *intern* maupun *ekstern* yang levelnya setaraf.

Dari beberapa tipe koordinasi diatas berdasarkan penelitian ini mengarah kepada tipe koordinasi *interdisciplinary*. Koordinasi *interdisciplinary* merupakan koordinasi yang dilakukan antar unit karena suatu organisasi tidak bisa melakukan kegiatan tanpa unit organisasi lain.

3. Tujuan dan Pentingnya Koordinasi

Hasibuan²⁵ mengemukakan beberapa tujuan koordinasi dalam organisasi yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan sarat pemikiran kearah tercapainya sasaran organisasi,

²⁵ Hasibuan, Malayu S.P.,Haji. *Manajemen: dasar, pengertian dan masalah*. Jakarta.Bumi Aksara, 2006. Hlm 87

- 2) Untuk menjurus keterampilan spesialisasi kearah sasaran organisasi,
- 3) Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan,
- 4) Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tujuan dan sasaran,
- 5) Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen (*man, money, material, machine, method, market*) ke arah sasaran organisasi,
- 6) Untuk menghindari kegiatan yang *overlepping* dari sasaran organisasi.

Koordinasi juga penting dilakukan didalam sebuah organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi. Selanjutnya, Hasibuan menambahkan pentingnya koordinasi dalam organisasi atau perusahaan yaitu sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya kekacauan, percekcoakan dan kekembaran atau kekosongan pekejaan.
- b. Dapat menyeleraskan antara orang-orang dnegan pekerjaannya untuk pencapaian tujuan perusahaan.
- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- d. Agar semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu harus membantu tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan tujuan dan pentingnya koordinasi yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tujuan dan pentingnya koordinasi. Tujuan dan pentingnya koordinasi dalam sebuah organisasi adalah menyelaraskan semua tugas, kegiatan dan pekerjaan agar tidak terjadinya suatu tumpang tindih.

4. Syarat-Syarat Koordinasi

Hasibuan²⁶ mengemukakan syarat-syarat koordinasi dalam melaksanakan suatu tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. *Sense of cooperation* atau perasaan untuk bekerjasama dilihat dari sudut bagian perbagian bidang pekerjaan
- b. *Rivalry*, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian dalam mencapai kemajuan
- c. *Team spirit*, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai.
- d. *Spirit de corps*, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bermanfaat.

5. Cara-Cara Mengadakan Koordinasi

Cara-cara mengadakan koordinasi²⁷ menurut Hasibuan antara lain:

- a. Memberikan keterangan langsung secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
- b. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri
- c. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, menemukan ide, saran-saran.

²⁶ Hasibuan, Malayu S.P.,Haji. *Manajemen: dasar, pengertian dan masalah*. Jakarta.Bumi Aksara, 2006. Hlm 88

²⁷ Ibid,.hlm 88

- d. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.
- e. Membina *human relations* yang baik antara sesama karyawan
- f. Manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan.

6. Karakteristik Koordinasi yang Efektif

Menurut Ibnu Syamsi²⁸ koordinasi yang baik harus dapat menciptakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas dalam organisasi
- b. Adanya suasana persaudaraan dan semangat keja sama yang besar dalam organisasi
- c. Adanya kontak-kontak dan komunikasi yang cukup di antara orang-orang dalam organisasi
- d. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan dengan perencanaan, pembimbingan dan pengendalian.

7. Sifat-sifat Koordinasi

Hasibuan berpendapat bahwa sifat-sifat koordinasi²⁹ adalah:

- a. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis
- b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.

²⁸ Syamsi, Ibnu. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994. hlm 116

²⁹ Hasibuan, Malayu S.P., Haji. *Manajemen: dasar, pengertian dan masalah*. Jakarta. Bumi Aksara, 2006. Hlm 87

- c. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

8. Mengukur Koordinasi

Menurut Handayani, koordinasi dapat diukur melalui indikator³⁰ :

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan media antar individu untuk saling memberikan informasi yang disampaikan secara lisan maupun melalui media lainnya. Komunikasi adalah hal terpenting dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk koordinasi. Komunikasi ini dapat dilihat dengan ada tidaknya informasi, ada tidaknya alur informasi, dan ada tidaknya teknologi informasi.

b. Kesadaran penting nya koordinasi

Kesadaran adalah suatu yang dimiliki oleh manusia yang sesuai dengan keyakinannya. Kesadaran pentingnya koordinasi adalah setiap masing-masing pihak terkait wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran akan pentingnya koordinasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan ketaatan terhadap hasil koordinasi.

c. Kompetensi partisipan

Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi

d. Kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi

³⁰ Noviana, Wahyu Prabandary dan Argo Pambudi. *Coordination Among Institutions In The Management Of The Borobudur Temple Cultural Heritage*. FIS UNY. Hal 574

Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi dapat diukur berdasarkan bentuk kesepakatan, sanksi bagi pelanggar kesepakatan dan insentif yang diberikan bagi pelaksana koordinasi.

e. Kontinuitas perencanaan

Kontinuitas perencanaan merupakan keberlanjutan dari keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

9. Hubungan Koordinasi dengan Fungsi-Fungsi Manajemen

a. Perencanaan dan koordinasi (*planning and coordination*)

Perencanaan akan mempengaruhi koordinasi, artinya semakin baik dan terincinya rencana maka akan semakin mudah melakukan koordinasi. Jika perencanaan disusun dengan baik dan hubungan rencana jangka panjang (*long range planning*) dan rencana jangka pendek (*short range planning*) terintegrasi dengan baik serta harmonis maka penerapan koordinasi akan lebih mudah.

b. Pengorganisasian dan koordinasi (*organizing and coordination*)

Pengorganisasian berhubungan dengan koordinasi, artinya jika organisasi baik maka pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah. Organisasi yang baik, apabila hubungan-hubungan antara individu karyawan baik, hubungan pekerjaan baik, *job description* setiap pejabat jelas.

c. Pengarahan dan koordinasi (*directing and coordination*)

Pengarahan mempengaruhi koordinasi, artinya dengan menggunakan bermacam-macam variasi dalam intensitas *directing force* akan membantu menciptakan koordinasi.

d. Pengisian Jabatan dan Koordinasi (*staffing and coordination*)

Penempatan karyawan membantu koordinasi, artinya jika setiap pejabat sudah ditempatkan sesuai dengan keahliannya maka koordinasi akan lebih mudah.

e. Pengendalian dan Koordinasi (*controlling and coordination*)

Pengendalian berhubungan langsung dengan koordinasi. Penilaian yang terus menerus atas kemajuan pekerjaan akan membantu menyelaraskan usaha-usaha, sehingga tujuan yang ditentukan semula dihasilkan, diperoleh dan tercapai dengan baik.

Kesimpulannya bahwa fungsi-fungsi manajemen (POSDC) berhubungan erat dengan koordinasi, artinya jika semua fungsi dalam proses manajemen diterapkan dengan baik maka koordinasi akan lebih mudah tercapai.

B. Tinjauan Tentang *Stakeholders*

1. Pengertian *Stakeholders*

Stakeholders adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu³¹. *Stakeholders* juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu

³¹ M.Imam Syafei dan Rahayu Sulistiowati. *Interaksi Stakeholders Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Kota Bandarlampung*. Administratio Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol 7 No 2, Juli-Desember 2016, 134.

maupun wakil kelompok jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap program³².

Pemangku kepentingan di sebuah institusi manapun memiliki pengaruh yang penting bagi keberlangsungan institusi ataupun lembaga. Munawaroh menyatakan bahwa para pemangku kepentingan itu lebih sering disebut dengan *stakeholders*³³. *Stakeholders* merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari dua buah kata, *stake* dan *holder*. Secara umum, kata *stakeholders* dapat diterjemahkan dengan pemangku kepentingan.

Berdasarkan penjabaran di atas, secara garis besar konsep *stakeholders* sebagai individu atau organisasi baik profit maupun non profit yang memiliki kepentingan dengan perusahaan sehingga dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, *stakeholders* semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, disimpulkan bahwa *stakeholders* adalah orang-orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal serta memiliki kepentingan dan kemampuan untuk mempengaruhi hasil.

³² Saharuddin dan Siska Oktavia. 2013, '*Hubungan Peran Stakeholders dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwilang Kabupaten Bogor*', ol. 01, no.03, hal 233, diakses pada Minggu, 7 Oktober 2018 pukul 20.45 WIB <http://journal.ipb.ac.id/>

³³ Munawaroh, Kholifatul. 2016. *Koordinasi Multistakeholders dalam Proses Rekrutmen Buruh Migran Asal Kabupaten Lampung Timur (Studi Tentang Koordinasi Multistakeholders di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung

2. Kategori Stakeholders

Menurut Jones, *stakeholders* dapat diklarifikasi kedalam dua kategori, yaitu:

- a. *Inside Stakeholders*, terdiri dari pihak yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumberdaya perusahaan secara berbeda di dalam organisasi perusahaan, seperti pemegang saham, para manager, dan karyawan.
- b. *Outside Stakeholders*, terdiri dari orang-orang atau pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pola karyawan perusahaan tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti pelanggan, *costumers*, pemasok, pemerintah (*government*), masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum (*general public*)³⁴.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kategori *stakeholders* dapat ditarik kesimpulan bahwa kategori *stakeholders* dalam skripsi ini ialah kategori *inside stakeholders* karena terdapat beberapa sumber daya manusia yang berbeda-beda dengan tugas pokok dan fungsi nya berbeda-beda juga di dalam suatu organisasi yaitu dalam hal ini mengenai PKH.

³⁴ Selviyanna, Irma Selly. 2012. Interelasi Multistakeholder dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility Bidang Pengembangan Usaha Makro Dan Menengah. (Studi pada PT.Perkebunan Nusantara VII). Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung

C. Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Tinjauan tentang program Keluarga Harapan (PKH) bersumber dari dokumen-dokumen resmi Kementerian Sosial RI yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

1. Pengertian PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan sosial PKH itu sendiri ialah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Keluarga penerima pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.

2. Tujuan PKH

PKH bertujuan meliputi yaitu :

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

3. Sasaran PKH

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

4. Hak dan Kewajiban KPM PKH

Adapun hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH yaitu sebagai berikut:

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan :

- a. Bantuan sosial PKH
- b. Pendampingan PKH
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial dan
- d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protocol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun

- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan
- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

5. Mekanisme Pelaksanaan PKH

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Perencanaan
- b. Penetapan calon peserta PKH
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH
- d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH
- e. Penyaluran Bantuan Sosial PKH
- f. Pendampingan PKH
- g. Peningkatan kemampuan keluarga
- h. Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH
- i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH dan
- j. Tranformasi Kepesertaan PKH

D. Tinjauan Tentang *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Konsep SDGs itu terdiri lahir pada kegiatan konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan

yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi. Menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut maka *SDGs* memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Tujuh belas tujuan global tersebut ialah sebagai berikut :

Gambar 1. Simbol 17 Tujuan Global SDGs



(Sumber : <https://www.sdg2030indonesia.org/>, diakses pada 27 Oktober 2018 pukul 8.52 WIB)

Ke-17 (Tujuh Belas) Tujuan Global (*Global Goals*) dari SDGs tersebut yaitu:

1) Tanpa kemiskinan

Memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya tetap menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia. Sementara jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem turun lebih dari setengah antara tahun 1990 dan 2015, terlalu banyak yang masih berjuang untuk kebutuhan manusia yang paling dasar. Ancaman

baru yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, konflik, dan kerawanan pangan berarti semakin banyak pekerjaan yang diperlukan untuk membawa orang keluar dari kemiskinan. SDG adalah komitmen berani untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai dan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi pada tahun 2030 melibatkan penargetan, peningkatan sumber daya dan layanan dasar dan mendukung masyarakat yang terkena dampak konflik dan bencana.

2) Tanpa Kelaparan

SDG bertujuan untuk mengakhiri semua bentuk kelaparan dan kekurangan gizi pada tahun 2030, memastikan semua orang terutama anak-anak memiliki makanan yang cukup dan bergizi sepanjang tahun. Ini melibatkan mempromosikan pertanian berkelanjutan, mendukung petani skala kecil dan akses teknologi dan pasar serta membutuhkan kerjasama internasional untuk memastikan investasi dalam infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

3) Kesehatan Yang Baik Dan Kesejahteraan

Kesehatan yang baik sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan dan Agenda 2030 mencerminkan kompleksitas dan keterkaitan keduanya, memperhitungkan pelebaran kesenjangan ekonomi dan sosial, urbanisasi yang cepat, ancaman terhadap iklim dan lingkungan, beban HIV dan penyakit menular lainnya.

4) Pendidikan Berkualitas

Mencapai pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua menegaskan bahwa pendidikan adalah salah satu kendaraan paling kuat dan terbukti untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan sekolah dasar dan menengah gratis pada tahun 2030. Bertujuan juga

untuk menyediakan akses yang sama ke pelatihan kejuruan yang terjangkau, untuk menghilangkan kesejangan gender dan kekayaan dan mencapai akses universal ke pendidikan tinggi yang berkualitas.

5) Kesetaraan Gender

Mengakhiri semua diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan bukan hanya hak asasi manusia yang mendasar, itu penting untuk masa depan yang berkelanjutan terbukti memberdayakan perempuan dan anak perempuan membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

6) Air Bersih dan Sanitasi

Air minum yang aman dan terjangkau untuk semua pada tahun 2030 mengharuskan berinvestasi dalam infrastruktur yang memadai, menyediakan fasilitas sanitasi dan mendorong kebersihan.

7) Energi Bersih dan Terjangkau

Berinvestasi dalam tenaga surya, angin dan termal meningkatkan produktivitas energy dan memastikan energy untuk semua adalah vital jika ingin mencapai SDG ini pada tahun 2030. Meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk menyediakan energy yang bersih dan lebih efisien di semua negara akan mendorong pertumbuhan dan membantu lingkungan.

8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

SDGs mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan inovasi teknologi. Mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja.

9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Investasi dalam infrastruktur dan inovasi adalah pendorong penting pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Mempromosikan industry yang berkelanjutan dan berinvestasi adalah cara yang penting untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan.

10) Mengurangi Kesenjangan

Kesenjangan membutuhkan kebijakan yang sehat untuk memberdayakan yang berpenghasilan rendah, dan mempromosikan inklusi ekonomi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau etnis.

11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas

Membuat kota berkelanjutan berarti menciptakan peluang karir dan bisnis, perumahan yang aman dan terjangkau, dan membangun masyarakat dan ekonomi yang tangguh. Melibatkan investasi dalam transportasi umum, menciptakan ruang publik hijau dan meningkatkan perencanaan dan manajemen perkotaan dengan cara partisipatif dan inklusif.

12) Konsumsi dan produksi bertanggung jawab

Manajemen yang efisien dari sumber daya alam dan cara membuang limbah beracun dan polutan adalah target penting untuk mencapai tujuan ini. Mendorong industri, bisnis, dan konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi limbah untuk mendukung negara-negara berkembang bergerak kearah pola konsumsi yang lebih berkelanjutan pada tahun 2030.

13) Aksi terhadap iklim

Mendukung wilayah yang rentan serta upaya untuk mengintegrasikan langkah-langkah risiko bencana, manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan dan keamanan manusia kedalam strategi pembangunan nasional.

14) Kehidupan Bawah Laut

SDG bertujuan untuk mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan dari polusi, serta mengatasi dampak pengasaman laut. Meningkatkan konservasi dan penggunaan sumber daya berbasis laut yang berkelanjutan melalui hukum internasional.

15) Kehidupan di darat

Upaya tindakan untuk mengurangi hilangnya habitas alami dan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari warisan dan mendukung ketahanan pangan dan air global, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta perdamaian dan keamanan.

16) Kedamaian, Keadilan dan Institusi yang kuat

SDG bertujuan untuk mengurangi semua bentuk kekerasan, dan bekerja dengan pemerintah serta masyarakat untuk mengakhiri konflik dan rasa tidak nyaman. Mempromosikan aturan hukum dan hak asasi manusia adalah kunci dari proses ini.

17) Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

SDG hanya dapat diwujudkan dengan kemitraan dan kerjasama global yang kuat.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas mengenai tujuh belas tujuan global dapat disimpulkan bahwa tujuan global *sustainable development goals* yang menyangkut terkait dengan PKH ialah tujuan yang pertama yaitu tentang *no poverty* (tanpa

kemiskinan). PKH itu sendiri merupakan suatu program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar taraf hidupnya lebih menjadi sejahtera.

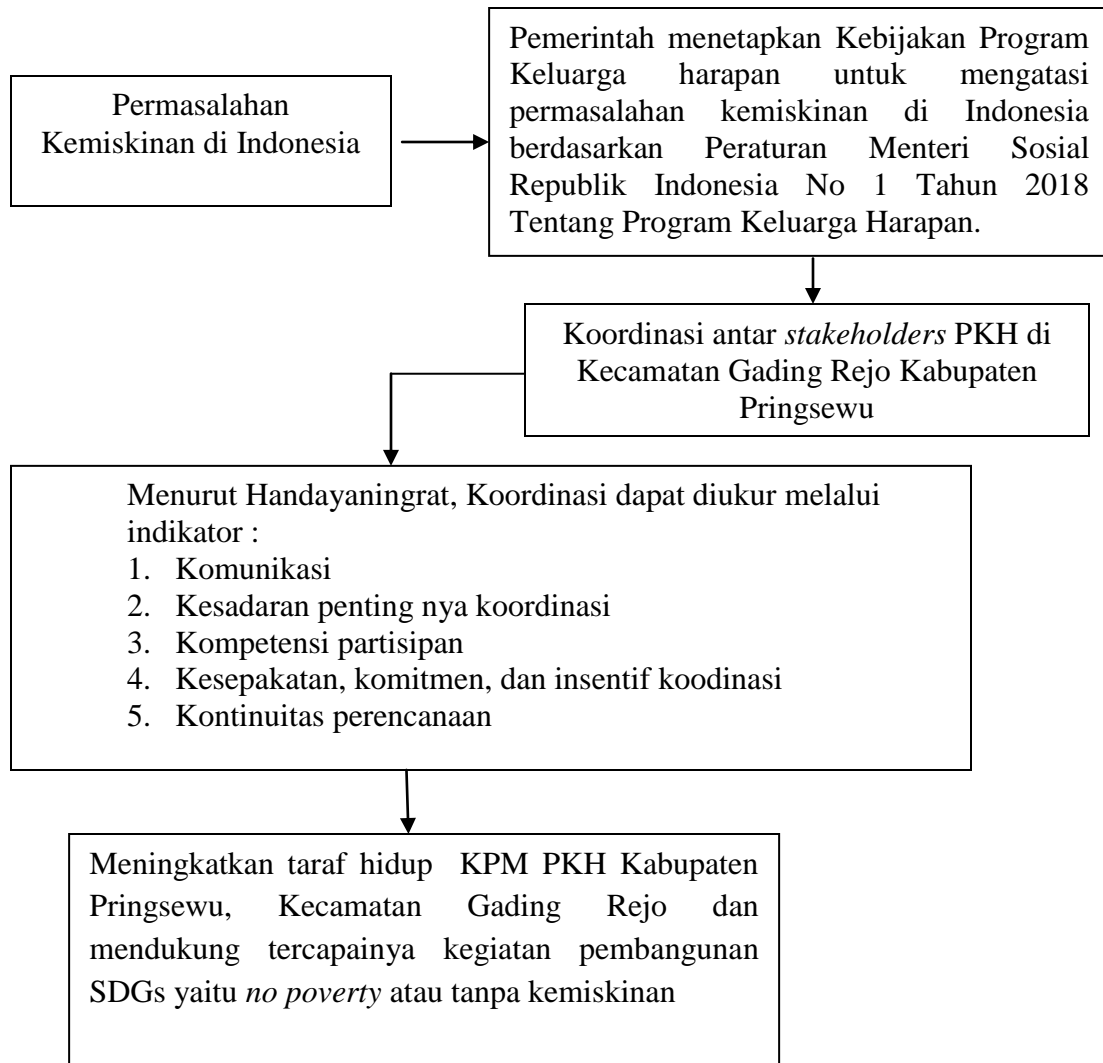
E. Kerangka Pikir

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, hal ini disebabkan karena kondisi Indonesia yang masih memiliki beberapa aspek yang masih berstatus berkembang, salah satunya masyarakat. Masyarakat Indonesia masih memiliki banyak masalah sosial dalam upaya untuk berkembang, salah satunya kemiskinan. Timbulnya permasalahan yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia, Pemerintah Indonesia menjalankan fungsinya untuk melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan berupa program-program pembangunan. Upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis rumah tangga, pemerintah Indonesia mengeluarkan program khusus yang dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan ini dimaksudkan sebagai strategi pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial sekaligus percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat pencapaian tujuan SDGs. Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh *stakeholders* atau pihak-pihak terkait. Diperlukannya koordinasi antar *stakeholders* tersebut agar dalam pelaksanaan program PKH dapat mencapai efisiensi, efektifitas dan produktifitas sehingga masyarakat miskin yang terdapat di Kabupaten Pringsewu khususnya di Kecamatan

Gading Rejo dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan serta mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Jika koordinasi antar *stakeholders* di Kabupaten Pringsewu berjalan baik dan maksimal maka dalam pelaksanaan PKH tercapai efektifitas, efisiensi dan produktifitas sehingga masyarakat miskin di Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo dapat meningkatkan taraf hidup dan mendukung tercapainya kegiatan pembangunan SDGs yaitu *no poverty* atau tanpa kemiskinan

Gambar 2. Kerangka Pikir



(Sumber : diolah oleh peneliti, 2018)

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berupaya memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah³⁵. Tipe penelitian deskriptif adalah dengan menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan memaparkan data secara kata-kata, dan gambar. Metode penelitian kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Koordinasi *Stakeholders* dari PKH. Metode penelitian kualitatif juga mewawancarai pihak-pihak terkait dalam PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

³⁵ Moleong, J. Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Risdakarya. 2011

B. Fokus Penelitian

Mempertajam penelitian maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Fokus penelitian menjadi batasan-batasan masalah yang diteliti dan mengarahkan peneliti agar tidak terjebak dengan banyaknya data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif. Sehingga fokus penelitian ini adalah Koordinasi antar *stakeholders* dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo dengan indikator dalam teori Handayaniingrat yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi
 - a. Ada tidaknya informasi
 - b. Ada tidak nya alur informasi
 - c. Ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran penting nya koordinasi
 - d. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - e. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi partisipan
 - a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
4. Kesepakatan, komitmen, dan insentif koodinasi
 - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b. Ada tidak nya pelaksana kegiatan
 - c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
 - d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi

5. Kontinuitas perencanaan
 - a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
 - b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat³⁶. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan fokus serta rumusan masalah penelitian. Unit analisa data dipahami sebagai obyek yang nantinya akan diteliti. Unit analisa yang digunakan dalam penelitian ini yakni Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu pada bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Sekretariat PPKH Kabupaten Pringsewu dan PPKH Kecamatan Gading Rejo bersama pihak yang bersangkutan (pendamping) serta masyarakat Kecamatan Gading Rejo. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Sekretariat UPPKH Kabupaten Pringsewu dan UPPKH Kecamatan Gading Rejo untuk mengetahui informasi lebih jelas terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan koordinasi *stakeholders*. Berdasarkan data Basis Data Terpadu Kabupaten Pringsewu 2018, Kecamatan Gading Rejo menempati urutan pertama dalam jumlah keluarga penerima Program Keluarga Harapan yaitu sebesar 3,027 keluarga. Sehingga tepat sekali jika penelitian dilakukan di Kecamatan Gading Rejo.

³⁶ Moleong, J. Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Risdakarya. 2011. hlm 128

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data³⁷ merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian. Penentuan informan kunci tidak hanya didasarkan atas keterwakilan sampel tetapi ditentukan oleh dua hal pokok yakni *good informan* dan keterlibatan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik :

a. Wawancara

Wawancara ialah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang dilakukan ialah testruktur dan tidak terstruktur. Wawancara testruktur dengan menggunakan panduan wawancara sehingga informasi yang diperoleh tidak menyimpang dan mampu menjawab permasalahan penelitian sedangkan wawancara tidak struktur adalah mewancarai informan mengenai apa saja yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tanpa panduan pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam.

Berikut ini adalah tabel informan yang diwawancara.

³⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta. 2016.hlm 222-242

Tabel 3. Daftar Informan

NO	Informan	Jabatan	Informasi	Waktu
1	Hartadi S.Sos	Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	PKH BDT Kemiskinan Kabupaten Pringsewu 2018 SK TKPKD SK TIKOR PKH Koordinasi <i>stakeholders PKH</i>	20 Mei 2019 pukul 10.30 WIB di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu
2	Bambang Hermanto	Koordinator PKH Kabupaten Pringsewu	Koordinasi PKH Kabupaten	20 Mei 2019 pukul 10.30 WIB di Sekretariat PPKH Kabupaten Pringsewu
3	Agus Priadi	Koordinator PKH Kecamatan Gading Rejo	Koordinasi PKH Kecamatan	20 Mei pukul 15.00 WIB di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Pekon Wates Kabupaten Pringsewu
4	Janggan Kasmoro	Pendamping PKH Kecamatan Gading Rejo	- Pelaksanaan PKH - Pendampingan KPM PKH - Koordinasi dengan KPM PKH	20 Mei pukul 13.40 WIB di Sekretariat PKH Kabupaten Pringsewu
5	Eka Helma Sari selaku pada tanggal	Ketua kelompok KPM PKH Kecamatan Gading Rejo Pekon Wonodadi	- Penggunaan Bantuan PKH - Koordinasi dengan pendamping	20 Mei pukul 17.00 WIB di rumah pekon Wonodadi

(Sumber : data diolah oleh peneliti, 2019)

b. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan suatu objek yang diteliti. Sehingga nantinya berbagai faktor dalam pelaksanaan terpantau dan terukur dengan jelas. Tidak hanya itu metode observasi merekam segala fenomena yang terjadi ketika berada di lokasi. Lokasi observasi di

Kecamatan Gading Rejo, Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu. Berikut ini adalah informasi yang diperoleh peneliti pada kegiatan observasi, antara lain:

Tabel 4. Objek Observasi

NO	Observasi	Informasi
1	Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Pringsewu	Koordinasi antar <i>stakeholders</i> Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo
2	Kantor Sekretariat PKH Kabupaten Pringsewu	Sarana dan Prasarana Sekretariat PKH
3	Grup <i>Whatsapp</i> Pendamping PKH Kecamatan Gading Rejo	Koordinasi pendamping PKH Kecamatan Gading Rejo
4	Pertemuan Peningkatan Kecakapan Keluarga Pekon Wonodadi	Penyampaian materi PKH dari pendamping ke KPM PKH
5	Nota Kesepakatan Kepolisian Republik Indonesia dengan Kementerian Sosial terkait Pengawasan Bantuan Sosial	Pengawasan bantuan sosial PKH

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2019)

2. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, peneliti juga memanfaatkan data sekunder. Menurut Sugiyono bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek. Moleong berpendapat bahwa dokumentasi dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu dokumen pribadi

(catatan harian, surat pribadi dan autobiografi) dan dokumen resmi (catatan, aturan lembaga, notulensi, majalah, koran, surat pernyataan dan lain sebagainya).

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan PKH pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo. Berikut ini adalah dokumen yang diperoleh peneliti dari kunjungan lapangan, antara lain:

Tabel 5. Dokumentasi Penelitian

NO	Dokumentasi	Substansi
1	Profil Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu	Gambaran Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu
2	SK BDT Kemiskinan Kabupaten tahun 2018	Jumlah total BDT Kemiskinan Kabupaten Pringsewu tahun 2018
3	SK TKPKD	Struktur dan tugas tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pringsewu
4	Kondisi KPM PKH Masyarakat Gading Rejo	Gambaran dan Kondisi KPM PKH Masyarakat Gading Rejo

(Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019)

E. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan

kepada orang lain. Analisis data dimulai dari perumusan, menjelaskan permasalahan, terjun ke lapangan dan sampai penulisan hasil penelitian selesai. Penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data³⁸. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga komponen berupa:

d. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi memberikan pengertian yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Dalam tahapan ini peneliti memilih-milih mana data yang dibutuhkan dalam penelitian koordinasi antar *stakeholders* dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Sebagai Upaya Mendukung *Sustainable Development Goals*

e. Penyajian Data

Penyajian data mempermudah apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya yang didasarkan dengan apa yang telah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data dilakukan dengan cara memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami terkait koordinasi antar *stakeholders* dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

³⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta. 2016.hlm 243-245

f. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan yaitu teknik analisis data yang melakukan *verification* secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data ³⁹ Menurut Moleong pengujian keabsahan data didasari atas kriteria: derajat kepercayaan (*kredibilitas*), keteralihan, ketergantungan dan kepastian.

Kriteria tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Penerapan kriteria derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria derajat kepercayaan ini berfungsi untuk (a) melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; (b) mempertunjukkan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan antara lain :

1. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti

³⁹ Moleong,J.Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.Edisi Revisi*.Bandung:Remaja Risdakarya.2011.hlm 345

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Menurut Sugiyono peneliti menggunakan dua cara triangulasi yaitu:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memenuhi data primer yang tidak didapatkan melalui observasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung situasi yang terjadi dalam pelaksanaan dilokasi. Dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan derajat kepercayaan melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pengujian data dan informasi mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan akan dikomplikasikan dengan hasil dokumentasi dan observasi yang memiliki kesamaan informasi. Informan tersebut berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, Koordinator PKH Kabupaten Pringsewu, Koordinator PKH kecamatan Gading Rejo, Pendamping serta KPM PKH Kecamatan Gading Rejo

b. Keteralihan

Teknik ini berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara *representative* mewakili populasi itu.

c. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reabilitas dalam penelitian yang non kualitatif. Pada cara nonkualitatif, realibilitas ditunjukkan dengan mengadakan replikasi studi. Peneliti dalam melakukan pengulangan dalam suatu studi dua atau beberapa kali dalam satu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reabilitasnya tercapai. Persoalan yang amat sulit dicapai disini ialah bagaimana mencari kondisi yang benar-benar sama dengan hasil penelitian dan fenomena yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu hasil penelitian ini benar atau tidak, maka penulis selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

d. Kepastian (*confirmability*)

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka hasil tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif. Hal ini dapat terlihat dari apa

yang telah dilakukan peneliti dalam menguji kepastian ini adalah dengan seminar tertutup dan terbuka dengan mengundang teman sejawat dan pembimbing.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai koordinasi antar *stakeholders* dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Pringsewu Kecamatan Gading Rejo dapat peneliti simpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan antar *stakeholders* tersebut sudah berjalan namun belum maksimal sehingga menghasilkan koordinasi yang tidak baik karena di Kabupaten Pringsewu tidak terdapat supervisor pekerjaan sosial sehingga tugas dan fungsi nya tersebut dialihkan kepada koordinator Kabupaten Pringsewu, kurangnya pemahaman yang dimiliki KPM PKH serta *stakeholders* lainnya sehingga terjadi adanya kesalahpahaman komunikasi serta rasa kepentingan untuk hadir dalam setiap pertemuan dan rapat koordinasi itu kurang, fasilitas sarana dan prasarana sekretariat masih menyewa tempat yang lokasinya cukup jauh seharusnya jika mengikuti aturan segala bentuk pelaksanaan kegiatan bertempat dalam satu lingkup dinas sosial itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti berikan terkait koordinasi antar *stakeholders* dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Pringsewu Kecamatan Gading Rejo yaitu sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu perlunya melakukan pengadaan supervisor pekerja sosial PKH agar sesuai dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 dan tidak terjadinya *double job* di Koordinator Kabupaten Pringsewu.
2. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu perlu melakukan koordinasi dengan Bupati terkait dengan perencanaan pengusulan penambahan anggaran dana yang bersumber dari APBD melalui permohonan Bupati serta DPRD yang nantinya anggaran dana tersebut dialokasikan kepada perbaikan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Dinas Sosial serta Sekretariat PKH Kabupaten Pringsewu sehingga menjadi satu lingkup kerja agar koordinasi antar kedua tersebut menjadi lebih maksimal.
3. Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, Koordinator Kecamatan serta pendamping PKH melakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif lagi agar pemahaman KPM terkait PKH menjadi lebih terbangun dan terjadinya perubahan perilaku di antara KPM PKH dalam segi ekonomi, sosial dan mampu berdaya saing sehingga kemiskinan di Kabupaten Pringsewu menurun dan dapat mendukung upaya pencapaian *Sustainable Development Goals*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eko Budi S & Rahayu Sulistiowati. *Azas-Azas Manajemen*. CV.Anugrah Utama Raharja (AURA). Bandarlampung.2015
- Handoko,T.Hani.2011. *Manajemen Edisi Kedua Puluh Satu*.BPFE.Yogyakarta:Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P.,Haji. *Manajemen: dasar, pengertian dan masalah*. Jakarta.Bumi Aksara, 2006.
- Moleong,J.Lexy.2011.*Metodelogi Penelitian Kualitatif.Edisi Revisi*.Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu,2011. *Kybernologi 1 Ilmu Pemerintahan baru*.Jakarta:Rineka Cipta
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 2004.
- Syamsi Ibnu. *Pokok-Pokok Organisasi&Manajemen*. Jakarta. PT RINEKA CIPTA.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Bandung : Alfabeta.

Jurnal

- Akmal. *Koordinasi Antar Instansi Terkait PelaksanaanPembangunan di Daerah*. Jurnal Demokrasi, Vo.V, No.1 Th.2006, hlm 1-2
- Devi Yulianti. *Implementasi Program Kemitraan Dalam Coorporate Social Responsibility (CSR) Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan*.hlm 2
- Dyah Ayu V, Ratih Nur P, Suwondo. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada*

- Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Public (JAP)*, Vol.2, No.12 Hlm 1-6
- Fauziah Riska Rahmeina (2018). Koordinasi Dalam Program KB Dikota Pekanbaru. *JOM FISIP*, Vol.5, No.1 April 2018
- Huzaipa (2014). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, Vol.2, No.7, Juli 2014, Hlm 158-169
- Ishartono, Santoso Tri Raharjo. Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Jurnal*, Vol 6, No.2, Hlm 154-272
- M.Imam Syafei dan Rahayu Sulistiowati (2016). *Interaksi Stakeholders Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Kota Bandarlampung*. *Administratio Jurnal Ilimiah Administrasi Publik dan Pembangunan*. Vol 7 No 2, Juli-Desember 2016, 134
- Muhammad Ali Z.M, Bambang S.H, Niken Lastiti V.A. Peran Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minopolitan Di Kecamatan Ngegelok Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Public(JAP)*, Vol.3, No.12, Hlm 2070-2076.
- Munawaroh, Kholifatul. 2016. Koordinasi Multistakeholder dalam Proses Rekrutmen Buruh Migran Asal Kabupaten Lampung Timur (Studi Tentang Koordinasi Multistakeholder di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur). Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Noviana, Wahyu Prabandary dan Argo Pambudi. *Coordination Among Institutions In The Management Of The Borobudur Temple Cultural Heritage*. FIS UNY. Hal 574
- Saharuddin dan Siska Oktavia. 2013, 'Hubungan Peran Stakeholders dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwilang Kabupaten Bogor, vol. 01, no.03, hal 233, diakses pada Minggu, 7 Oktober 2018 pukul 20.45 WIB <http://journal.ipb.ac.id/>
- Selviyanna, Irma Selly. 2012. Interelasi Multistakeholder dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility Bidang Pengembangan Usaha Makro Dan Menengah. (Studi pada PT.Perkebunan Nusantara VII). Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- STT Mandala Bandung, "Negara Berkembang, JurnalUmum", http://indonesia.stt-mandala.web.id/ind/2517-2408/Negara-Berkembang_14552_stt-mandala_indonesia-stt-mandala.html (diakses pada 27 Agustus 2018, pukul 1.12)

Yudid B.S.Tlonaen, Willy T.H, Carmia Diahloka. *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.3, No.1 (2014) hlm 29

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Keluarga Harapan

Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/104/KPTS/B.01/2018 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pringsewu Tahun 2018

Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/150/KPTS/D.04/2018 Tentang Tim Koordinasi dan Tim Program Keluarga Harapan Kabupaten Pringsewu Tahun 2018

Web

Badan Pusat Statistik. Presentase Penduduk Miskin September 2017 mencapai 10,72 persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html> diakses pada 18 Agustus 2018

Katadata. 2018, Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 267 Jiwa. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa> diakses pada 18 Agustus 2018

Kementrian Sosial Republik Indonesia. Program KeluargaHarapan. <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> diakses pada 19 Agustus 2018

Program Keluarga Harapan. <https://pkh.kemsos.go.id/> diakses pada 19 Agustus 2018

RMOL.CO. *Data Kemensos Bermasalah, Program Rakyat Miskin Rawan Dipermainkan.* <https://nusantara.rmol.co/read/2018/04/15/335414/Data-Kemensos-Bermasalah,-Program-Rakyat-Miskin-Rawan-Dipermainkan-> diakses 25 November 2018 pukul 23.33 WIB

AntaraNews.com. *Mensos:Oknum Pendamping Penyelewengan PKH di Proses Hukum.* <https://www.antaranews.com/berita/725825/mensos-oknum-pendamping-penyelewengan-pkh-diproses-hukum> diakses 25 November 2018 pukul 23.44 WIB

Lampost.com. *Terkendala Administrasi Saat Pencairan PKH? Solusinya Hubungi Dinsos.* <http://www.lampost.co/berita-terkendala-administrasi-saat-pencairan-pkh-solusinya-hubungi-dinsos.html> diakses 25 November 2018 pukul 23.48 WIB